
ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DI DESA LOMBO KECAMATAN PITU RIASE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Badrul Ahmad Ramadhan¹, Muhammad Rais Rahmat Razak², Herman Dema³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

Email: bade71776@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui identifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang didukung aplikasi NVivo 12 Plus melalui teknik coding dan Crosstab Query. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan berada pada kategori cukup efektif, namun belum optimal. Faktor pendukung utama adalah partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, dan komitmen aparatur desa. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan anggaran, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Dari aspek kualitas pelayanan, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi indikator yang paling dominan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pembangunan jalan telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. Penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi anggaran, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Desa, Infrastruktur Jalan, Kualitas Pelayanan, Partisipasi Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the performance of the Lombo Village Government in road infrastructure development by identifying supporting factors, inhibiting factors, and the quality of public services provided to the community. The study employed a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, supported by NVivo 12 Plus through coding and Crosstab Query techniques. The findings indicate that the performance of the Lombo Village Government in road infrastructure development can be categorized as fairly effective, although it has not yet reached an optimal level. The main supporting factors include community participation, support from the local government, availability of resources, and the commitment of village officials. Meanwhile, the primary obstacles consist of limited capacity of village officials, budget constraints, and uneven community participation. In terms of service quality, transparency and information disclosure emerged as the most dominant indicators in enhancing public trust. Road infrastructure development has improved community accessibility and mobility; however, improvements are still needed in development management and public service delivery. Strengthening the capacity of

village officials, optimizing budget management, and increasing community participation are strategic measures to achieve more effective and sustainable development.

Keywords: *Village Government Performance, Road Infrastructure, Service Quality, Community Participation.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur ialah merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan memperluas akses terhadap pelayanan publik (Zhang, Lan, Guo, & Zhao, 2026). Infrastruktur jalan memiliki peran strategis sebagai sarana penghubung yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Ketersediaan jalan yang memadai mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya transportasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sebaliknya, kondisi jalan yang rusak dapat menghambat aktivitas ekonomi, memperlambat distribusi hasil produksi, dan menurunkan kualitas pelayanan publik (Burdelski, 2026).

Dalam konteks pembangunan desa, pemerintah desa memiliki peran penting sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan Masyarakat (Baumann, Hunziker, & Grêt-Regamey, 2026). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, melaksanakan program pembangunan, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Rose, Washington, Stewart, & Malley, 2026).

Kinerja pemerintah desa menjadi aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. (Srinitiworawong & Kiattisin, 2026), kinerja organisasi publik dapat diukur melalui indikator produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas. Produktivitas berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mencapai target pembangunan secara efektif dan efisien, kualitas layanan berkaitan dengan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sedangkan responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketiga indikator tersebut menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur (Elfiani & Marpaung, 2025).

Desa Lombo, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan infrastruktur jalan. Sebagian besar masyarakat desa bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan yang sangat bergantung pada akses transportasi yang memadai. Namun, kondisi beberapa ruas jalan di desa tersebut masih mengalami kerusakan sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian (Sumarni, Bahtiar, Abdain, & Takdir, 2024). Kondisi tersebut berdampak pada tingginya biaya transportasi, lambatnya pemasaran hasil produksi, serta rendahnya efektivitas aktivitas ekonomi Masyarakat (Sulistiyowati & Nataliawati, 2022).

Permasalahan infrastruktur jalan di Desa Lombo menunjukkan adanya tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Meskipun pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program pembangunan, masih terdapat kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi secara optimal (Shabri, Edgina, & Said, 2022). Kondisi ini mengindikasikan pentingnya evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan, khususnya terkait produktivitas pembangunan, kualitas pelayanan, dan kemampuan pemerintah desa dalam merespons kebutuhan masyarakat. (Yuliana, 2022), Selain itu, keberhasilan pembangunan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, seperti

partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, kapasitas aparatur desa, serta ketersediaan anggaran Pembangunan (Hidayaturrahman, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung yang paling dominan dalam pembangunan infrastruktur jalan, disusul oleh dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, dan komitmen aparatur desa (Iqbal, Rifin, & Juanda, 2019). Sebaliknya, keterbatasan kapasitas aparatur desa, minimnya anggaran, serta partisipasi masyarakat yang belum merata menjadi faktor penghambat utama yang memengaruhi efektivitas Pembangunan (Abdurrahman, Ramayanto, & Suasmy, 2019). Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur desa tidak hanya bergantung pada aspek fisik semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur dari aspek fisik dan pengelolaan anggaran, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis kinerja pemerintah desa melalui indikator produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas yang diperkuat dengan analisis NVivo 12 Plus. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjelaskan hubungan antara kinerja pemerintah desa dan keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui pendekatan kinerja organisasi publik yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas (Daulay, 2020). Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas pembangunan desa. Secara akademis (EB, Pungkasanti, & Handayani, 2024). Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik dan pemerintahan desa, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja pemerintah desa merupakan gambaran tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa (Bieleman, Pot, & Tillema, 2026). Dalam konteks administrasi publik, kinerja tidak hanya diukur dari pencapaian program pembangunan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut (Dwiyanto, 2016), kinerja organisasi publik dapat dinilai melalui beberapa indikator, antara lain produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas. Ketiga indikator tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pemerintah desa mampu menjalankan fungsi pembangunan dan pelayanan publik secara optimal (Arevalillo et al., 2026).

Produktivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan dan merealisasikan pembangunan sesuai tujuan yang telah ditetapkan (Lub, Wade, van Summeren, & Devenish, 2026). Dalam pembangunan infrastruktur jalan, produktivitas tercermin dari kemampuan pemerintah desa menyelesaikan pembangunan secara efektif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, (Brons, 2026) kualitas layanan menunjukkan tingkat mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam proses maupun hasil Pembangunan (Obi, Ojo, & Eboh, 2026). Kualitas layanan dapat dilihat dari transparansi pelaksanaan pembangunan, keterbukaan informasi, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan (Habibi-Moshfegh, Naderpajouh, Morshedi, Fallah-Fini, & Wong, 2026).

Selain produktivitas dan kualitas layanan, responsivitas juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah desa. Responsivitas merupakan kemampuan

pemerintah desa dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyerap aspirasi warga, dan menindaklanjutinya melalui kebijakan atau program pembangunan yang tepat sasaran. Pemerintah desa yang responsif akan lebih mampu menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas (Abiodun Bisiriyu & Tshombe Muhlya, 2026). Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi Masyarakat (Hafez, 2026). Infrastruktur jalan yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi hasil pertanian, mengurangi biaya transportasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa (Madera et al., 2026). Sebaliknya, kondisi jalan yang kurang memadai dapat menghambat mobilitas masyarakat dan menurunkan efektivitas berbagai aktivitas ekonomi (Falconí, Burbano, & Cango, 2026). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah desa dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan (Karacsonyi, Taylor, & Zander, 2026).

Kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, dan komitmen aparatur desa (Rostovskaya, Ananchenkova, & Rostovsky, 2026). Di sisi lain, keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas aparatur desa, kondisi geografis, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembangunan (Maconachie, Radley, Barlow, & Sun, 2026). Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pengelolaan sumber daya, dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan (Veilleux et al., 2026).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan (Mariani, Longo, & Brandoni, 2026). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lombo, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan fokus pada analisis kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui indikator produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan Pembangunan (Thiri & Martinez-Alier, 2026).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Li, 2026). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pembangunan infrastruktur jalan (van Cranenburgh & Garrido-Valenzuela, 2026). Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, dan masyarakat Desa Lombo (Amoakoh, Boafu, Obodai, & Dotsey, 2026). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen desa, laporan pembangunan, arsip, peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (Archer-Brown & Rosenow, 2026).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, kondisi pelayanan publik, serta berbagai faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah desa (Huang, 2026). Observasi

dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi infrastruktur jalan dan proses pembangunan yang berlangsung di lokasi penelitian. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan berbagai dokumen, foto kegiatan, laporan pembangunan, dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Dua, 2026).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. (Schumpeter, 1912). Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan disederhanakan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan visualisasi untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian (Sugiyono, 2020).

Untuk mendukung proses analisis data, penelitian ini memanfaatkan aplikasi NVivo 12 Plus melalui teknik *coding* dan *Crosstab Query*. (Efendi & Syafril, 2025) Penggunaan NVivo membantu peneliti dalam mengelompokkan data berdasarkan tema-tema penelitian, mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel, serta memvisualisasikan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta hasil observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Melalui prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Kinerja pemerintah desa merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat lokal, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan dasar Masyarakat (Deocarlis, Decena, & Honrade-Sarabia, 2026). Infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan pelayanan publik karena berfungsi sebagai sarana penghubung antarwilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan secara efektif. Dalam penelitian ini, kinerja Pemerintah Desa Lombo dianalisis berdasarkan indikator produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas sebagaimana dikemukakan oleh (Dwiyanto, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal (Judijanto, 2026). Dari aspek produktivitas, pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program pembangunan jalan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa. (Lestari, Fuadi, & Rakhman Setyanto, 2026), Kegiatan perencanaan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga kebutuhan pembangunan yang diusulkan dapat diprioritaskan sesuai kondisi lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip partisipatif dalam proses pembangunan. Beberapa ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan telah mendapatkan perbaikan dan pembangunan sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Menezes, Nayak, & Yesodharan, 2026).

Meskipun demikian, produktivitas pembangunan infrastruktur jalan masih menghadapi sejumlah kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ruas jalan yang kondisinya belum memadai dan memerlukan penanganan lebih lanjut (Muñoz & Jaque, 2026). Keterbatasan anggaran pembangunan menyebabkan pemerintah desa harus

menentukan skala prioritas sehingga tidak seluruh kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu yang bersamaan. Kondisi ini mengakibatkan target pembangunan yang telah direncanakan belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, produktivitas pemerintah desa dapat dikategorikan cukup efektif karena pembangunan tetap berjalan sesuai program yang telah ditetapkan, namun hasilnya belum mampu menjawab seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat secara menyeluruh (Koltunov, Tricarico, & Bisello, 2026).

Dari aspek kualitas layanan, Pemerintah Desa Lombo menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pemerintah desa memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah desa. (Velayo, Suson, Aguilos, Zhao, & Bacosa, 2026), Transparansi tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. (Mikołajczyk, Majda, Podlewska, & Wróbel, 2026), Keterbukaan informasi juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung.

Selain transparansi, (Magnetti, 2026), kualitas layanan juga dapat dilihat dari mutu hasil pembangunan infrastruktur jalan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat menilai bahwa pembangunan jalan yang dilakukan telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kemudahan akses transportasi dan memperlancar aktivitas ekonomi Masyarakat (Dong, Reffat, & Liang, 2026). Jalan yang lebih baik mempermudah masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian, mengakses fasilitas pendidikan, serta menjangkau pelayanan kesehatan. Namun demikian, (Dhandhaniala, Mittal, & Pathak, 2026) masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kualitas hasil pembangunan belum sepenuhnya memenuhi harapan karena beberapa ruas jalan masih membutuhkan perbaikan lanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pemerintah desa telah mengalami peningkatan, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar tingkat kepuasan masyarakat dapat meningkat secara merata (Mehta et al., 2026).

Aspek responsivitas juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja Pemerintah Desa Lombo. Responsivitas mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengenali kebutuhan masyarakat dan meresponsnya melalui program pembangunan yang tepat sasaran. (WINEY & SIREGAR, 2019), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan musyawarah desa yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi terkait kondisi infrastruktur jalan (Alfaed et al., 2024).

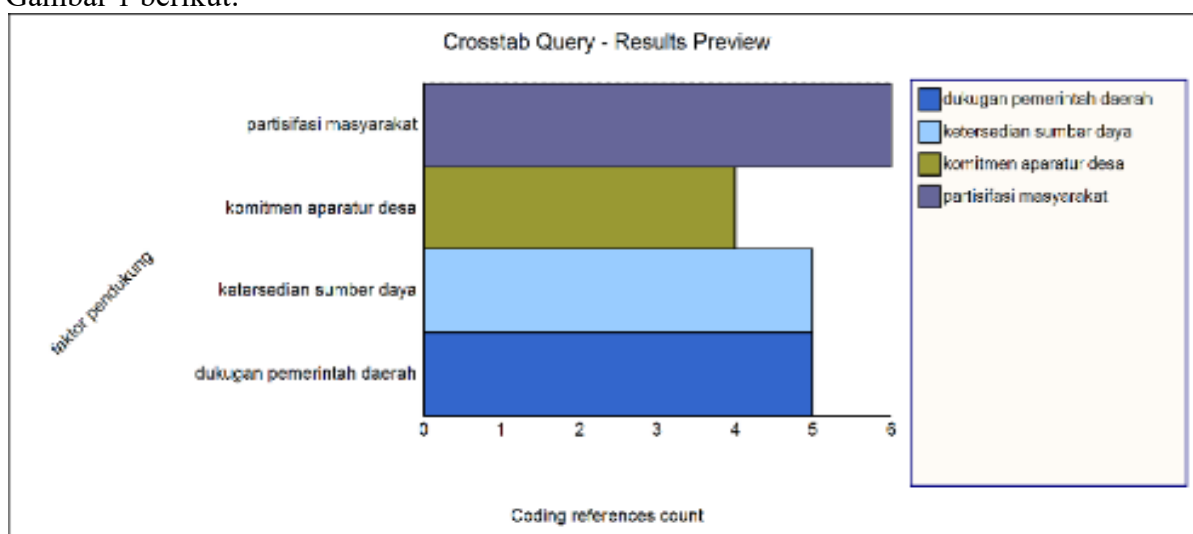
Meskipun pemerintah desa telah menunjukkan responsivitas yang cukup baik, kemampuan dalam memenuhi seluruh aspirasi masyarakat masih terbatas oleh faktor anggaran dan sumber daya yang tersedia (Deviana, Husaini, & Abdullah, 2021). Tidak semua usulan pembangunan dapat direalisasikan dalam satu periode pembangunan sehingga beberapa kebutuhan masyarakat harus menunggu tahap pembangunan berikutnya. (Fatchuriza & Prasajo, 2021) Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha merespons kebutuhan masyarakat secara maksimal, tetapi realisasi pembangunan masih dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan yang dihadapi. Oleh karena itu, peningkatan responsivitas perlu diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya yang memadai agar kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi secara lebih optimal (Ayu, Syamsuddin, & Aziz, 2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan berada pada kategori cukup efektif. (Azis, Fitriana, & Husni, 2024), Keberhasilan tersebut terlihat dari adanya pembangunan jalan yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta adanya upaya pemerintah

desa dalam menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, kinerja tersebut belum dapat dikategorikan optimal karena masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta belum meratanya partisipasi Masyarakat (Hanny et al., 2020). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa, optimalisasi pengelolaan anggaran, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lombo. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan di masa mendatang (Valentin, Isabella, & Amaliatulwalidain, 2024).

2. Analisis Faktor Pendukung Kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi administratif, tetapi juga oleh berbagai faktor pendukung yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut penting dilakukan untuk memahami unsur-unsur yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui analisis menggunakan fitur *Crosstab Query* pada NVivo 12 Plus, penelitian ini memetakan faktor-faktor yang paling dominan mendukung kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan intensitas kemunculannya dalam data hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil pemetaan tersebut disajikan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Faktor Pendukung

Sumber: Nvivo 12 Plus 2026

Berdasarkan hasil *Crosstab Query NVivo 12 Plus* pada gambar di atas, terdapat empat faktor yang berperan sebagai pendukung kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan, yaitu partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, dan komitmen aparatur dGamesa. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki jumlah coding references tertinggi, diikuti oleh dukungan pemerintah daerah dan ketersediaan sumber daya, sedangkan komitmen aparatur desa memiliki tingkat kemunculan yang relatif lebih rendah (Hanny et al., 2020). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lombo lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal berupa keterlibatan masyarakat dan dukungan

antarlembaga dibandingkan faktor internal organisasi pemerintahan desa (Puustinen, Easthope, & Löschke, 2026).

Dominannya faktor partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat secara aktif dalam proses pembangunan (Shiozaki et al., 2026). Keterlibatan masyarakat terlihat melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa, penyampaian aspirasi, serta partisipasi dalam kegiatan gotong royong (Shabri et al., 2022). Tingginya intensitas partisipasi ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pembangunan infrastruktur jalan sebagai sarana penunjang aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, keterlibatan masyarakat merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan karena mampu meningkatkan efektivitas program, memperkuat legitimasi kebijakan, serta menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar peluang keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa (Iqbal et al., 2019).

Faktor kedua yang memiliki kontribusi signifikan adalah dukungan pemerintah daerah. Tingginya frekuensi kemunculan faktor ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lombo tidak dapat dilepaskan dari dukungan pemerintah kabupaten dalam bentuk bantuan anggaran, kebijakan, maupun pembinaan teknis (Rosojati, Darmastuti, & Atiandina, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan desa pada hakikatnya merupakan proses kolaboratif yang memerlukan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Keterbatasan kapasitas fiskal desa menyebabkan pemerintah desa belum mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan secara mandiri (Ferdinandus, 2024). Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Selanjutnya, faktor ketersediaan sumber daya juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap keberhasilan pembangunan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta kemampuan organisasi dalam mengelola pembangunan. Keberadaan sumber daya yang memadai memungkinkan pemerintah desa menjalankan program pembangunan secara lebih efektif (Dharma, Hariyanto, & Muharram, 2023). Namun demikian, posisi faktor ini yang berada di bawah partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya tersebut melalui tata kelola yang baik.

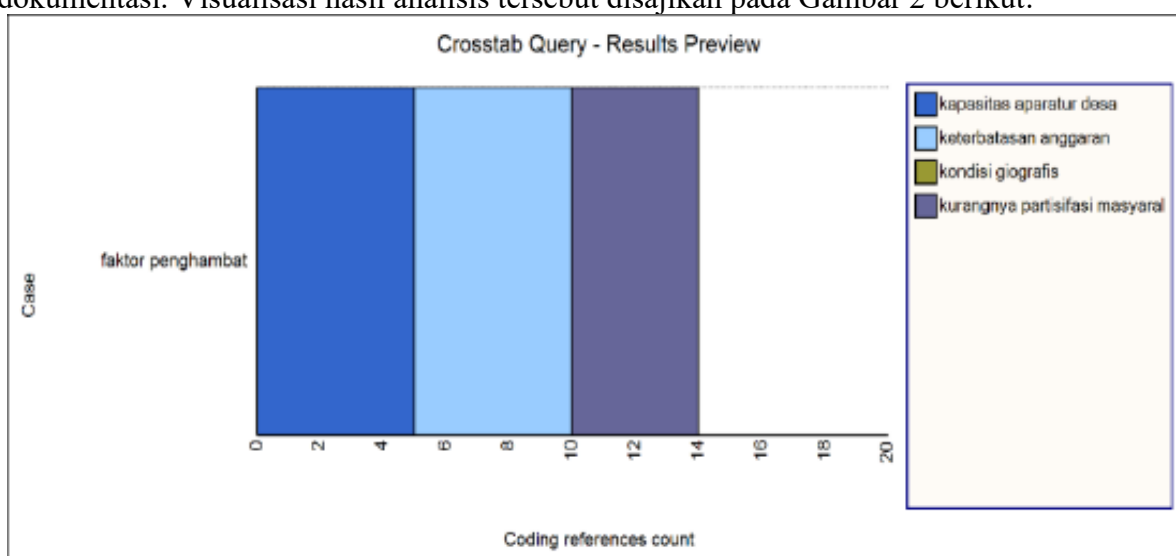
Sementara itu, komitmen aparatur desa merupakan faktor pendukung dengan tingkat kemunculan yang paling rendah dibandingkan faktor lainnya (Sholikhah & Khoiriawati, 2022). Meskipun demikian, hal ini tidak menunjukkan bahwa komitmen aparatur desa tidak penting, melainkan menggambarkan bahwa informan lebih banyak menyoroti faktor partisipasi masyarakat dan dukungan eksternal sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Secara teoritis, komitmen aparatur tetap menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pembangunan karena berkaitan dengan tanggung jawab, integritas, dan konsistensi pemerintah desa dalam melaksanakan program Pembangunan (Maladi, Firdausy, & Madalina, 2024). Tanpa adanya komitmen yang kuat dari aparatur desa, berbagai bentuk dukungan yang tersedia tidak akan mampu menghasilkan pembangunan yang optimal.

Secara keseluruhan, hasil Crosstab Query menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung paling dominan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lombo, yang kemudian diperkuat oleh dukungan pemerintah daerah dan ketersediaan sumber daya. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak semata-mata

ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa, tetapi juga oleh tingkat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dari perspektif teori kinerja organisasi publik, kondisi tersebut mencerminkan bahwa peningkatan produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun kemitraan yang efektif dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi pembangunan di masa mendatang perlu diarahkan pada penguatan partisipasi masyarakat, optimalisasi dukungan pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya agar pembangunan infrastruktur jalan dapat berlangsung secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat (Sholikhah & Khoiriawati, 2022) .

3. Analisis Faktor Penghambat Kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Sebelum menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menurunkan efektivitas kinerja pemerintah desa. Analisis terhadap faktor penghambat memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang muncul selama proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Pemahaman terhadap hambatan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan dan penguatan kapasitas kelembagaan agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung lebih optimal. Melalui fitur *Crosstab Query* pada NVivo 12 Plus, penelitian ini memetakan faktor-faktor penghambat berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam data hasil wawancara dan dokumentasi. Visualisasi hasil analisis tersebut disajikan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Faktor Penghambat

Sumber: Nvivo 12 Plus 2026

Berdasarkan hasil *Crosstab Query NVivo 12 Plus*, faktor penghambat kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan meliputi kapasitas aparatur desa, keterbatasan anggaran, kondisi geografis, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa, keterbatasan anggaran, dan kurangnya partisipasi masyarakat merupakan hambatan yang paling dominan, sedangkan kondisi geografis memiliki pengaruh yang relatif lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan pembangunan lebih banyak berasal dari aspek kelembagaan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat dibandingkan faktor lingkungan fisik (Pambudi, Hidayati, & Pramujo, 2022).

Rendahnya kapasitas aparatur desa menjadi kendala utama karena memengaruhi efektivitas perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain,

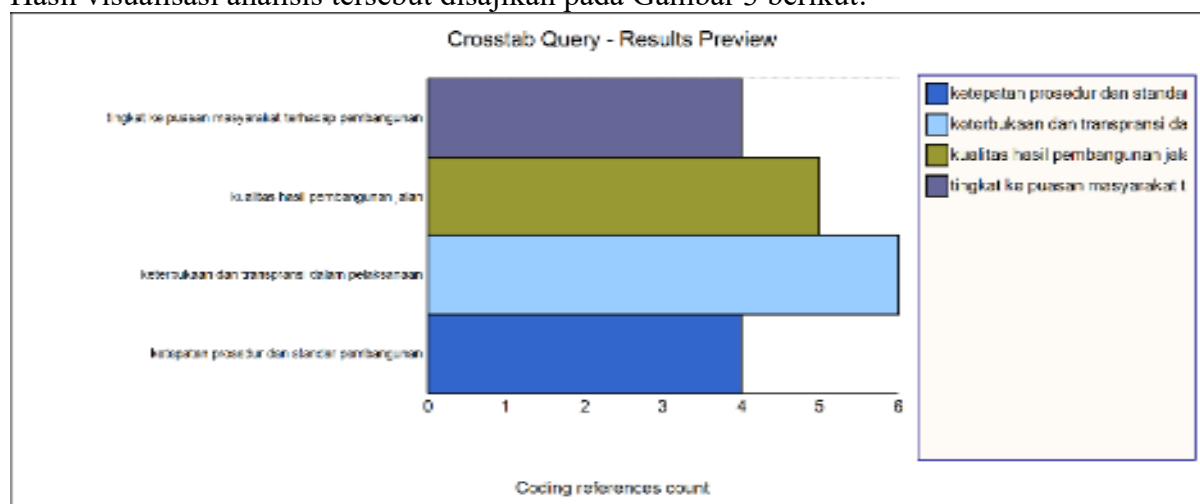
keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah desa belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur jalan secara optimal, sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Selain itu, partisipasi masyarakat yang belum merata turut memengaruhi kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan, karena tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara maksimal.

Sementara itu, kondisi geografis memang memberikan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama terkait distribusi material dan akses pembangunan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, faktor ini tidak menjadi hambatan utama dibandingkan keterbatasan kapasitas aparatur dan anggaran.

Secara keseluruhan, hambatan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lombo menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pemerintah desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya keuangan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi pengelolaan anggaran, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

4. Analisis Kualitas Layanan Pemerintah Desa Lombo dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Kualitas layanan pemerintah desa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan. Penilaian terhadap kualitas layanan tidak hanya berfokus pada hasil fisik pembangunan yang dihasilkan, tetapi juga mencakup proses pelayanan yang dijalankan, seperti kepatuhan terhadap prosedur, keterbukaan informasi, serta respons masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Analisis terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Desa Lombo mampu memenuhi harapan masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan menggunakan fitur *Crosstab Query* pada NVivo 12 Plus, penelitian ini memetakan indikator-indikator kualitas layanan berdasarkan intensitas kemunculannya dalam data hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil visualisasi analisis tersebut disajikan pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Kualitas Pelayanan

Sumber: Nvivo 12 Plus 2026

Berdasarkan hasil *Crosstab Query NVivo 12 Plus*, kualitas layanan Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan dianalisis melalui indikator ketepatan prosedur dan standar pembangunan, keterbukaan dan transparansi, kualitas hasil pembangunan jalan, serta tingkat kepuasan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa

keterbukaan dan transparansi merupakan indikator yang paling dominan, diikuti oleh kualitas hasil pembangunan jalan, sedangkan ketepatan prosedur dan tingkat kepuasan masyarakat memiliki tingkat kemunculan yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan utama kualitas layanan pemerintah desa terletak pada aspek transparansi, sementara kualitas hasil pembangunan dan kepuasan masyarakat masih memerlukan peningkatan (Deviana et al., 2021).

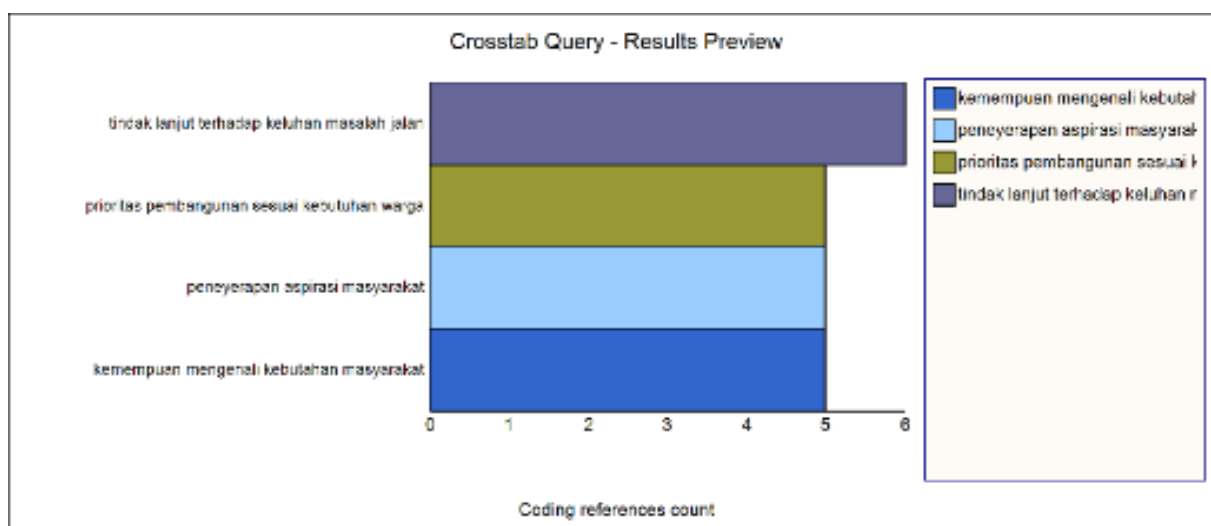
Dominannya aspek keterbukaan dan transparansi mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Lombo telah menerapkan prinsip *good governance* melalui penyampaian informasi pembangunan, pelaksanaan musyawarah desa, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat serta memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Di sisi lain, kualitas hasil pembangunan jalan dinilai telah memberikan manfaat terhadap peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa ruas jalan yang memerlukan perbaikan sehingga manfaat pembangunan belum dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat kemunculan indikator ketepatan prosedur dan kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan dan belum mampu memberikan kepuasan yang merata (Alfaed et al., 2024).

Secara keseluruhan, kualitas layanan Pemerintah Desa Lombo berada pada kategori cukup baik, dengan transparansi sebagai aspek yang paling menonjol. Namun, untuk mewujudkan pelayanan yang lebih optimal, diperlukan peningkatan kualitas hasil pembangunan, penguatan kepatuhan terhadap standar pembangunan, serta pelayanan yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

5. Analisis Responsivitas Pemerintah Desa Lombo dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Responsivitas merupakan dimensi penting dalam menilai kinerja pemerintah desa karena mencerminkan kemampuan aparatur dalam memahami, menanggapi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, tingkat responsivitas dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah desa mampu menyerap aspirasi warga, menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, serta memberikan tindak lanjut terhadap berbagai keluhan dan permasalahan yang muncul selama proses pembangunan berlangsung. Analisis terhadap aspek ini penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan telah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan mencerminkan prinsip pelayanan publik yang responsif. Melalui fitur *Crosstab Query* pada NVivo 12 Plus, penelitian ini memetakan indikator-indikator responsivitas berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam data hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil visualisasi analisis tersebut disajikan pada Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Responsivitas

Sumber: Nvivo 12 Plus 2026

Berdasarkan hasil *Crosstab Query NVivo 12 Plus*, responsivitas Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan dianalisis melalui empat indikator, yaitu kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat, penyerapan aspirasi masyarakat, prioritas pembangunan sesuai kebutuhan warga, dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat merupakan indikator yang paling dominan, sedangkan indikator lainnya memiliki tingkat kemunculan yang relatif seimbang. Temuan ini mengindikasikan bahwa responsivitas pemerintah desa lebih tercermin pada tindakan nyata dalam merespons permasalahan masyarakat dibandingkan pada aspek perencanaan (Valentin et al., 2024).

Dominannya tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen yang cukup baik dalam merespons permasalahan infrastruktur jalan yang dihadapi masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya pemerintah desa untuk menjalankan fungsi pelayanan publik secara responsif melalui penyelesaian masalah yang dianggap mendesak. Selain itu, kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat dan penyerapan aspirasi melalui musyawarah desa menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan pendekatan partisipatif dalam proses Pembangunan (Azis et al., 2024). Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah desa belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan anggaran, kapasitas aparatur desa, dan tingginya kebutuhan pembangunan menyebabkan tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat direalisasikan. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa.

Secara keseluruhan, responsivitas Pemerintah Desa Lombo berada pada kategori cukup baik, yang ditunjukkan oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyerap aspirasi, menetapkan prioritas pembangunan, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Namun, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sumber daya, dan penguatan mekanisme partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan (Okberi, Khotami, & Herman, 2022).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan berada pada kategori cukup efektif, namun belum optimal. Dari aspek produktivitas, pemerintah desa telah melaksanakan pembangunan jalan sesuai perencanaan, tetapi hasilnya belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat karena masih terdapat ruas jalan yang memerlukan perbaikan. Dari aspek kualitas layanan, transparansi dan keterbukaan informasi telah berjalan dengan baik, namun kualitas hasil pembangunan dan tingkat kepuasan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, dari aspek responsivitas, pemerintah desa telah berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat, meskipun belum seluruh kebutuhan infrastruktur dapat direalisasikan karena keterbatasan yang ada.

Kinerja pembangunan infrastruktur jalan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung utama meliputi partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, dan komitmen aparatur desa. Sebaliknya, keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas aparatur desa, kondisi geografis, dan partisipasi masyarakat yang belum merata menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pengelolaan anggaran, serta penguatan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., Ramayanto, R., & Suasmy, A. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kampus Politeknik Pariwisata Negeri Lombok. *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(2), 105–112.
- Abiodun Bisiriyu, T., & Tshombe Muhlya, L. (2026). Energy Sustainability and Sustainable Development Agenda: The Role of Public Private Partnership in South Africa. *African And Global Issues Quarterly*, 7(1), 286–310.
- Alfaed, D., Arkanudin, A., Maya, M., Aminah, S., Marini, M., Putri, R. R., & Zibrani, Y. (2024). Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. *Sosio Edukasi Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 7(2), 167–178.
- Amoakoh, A. O., Boafo, J., Obodai, J., & Dotsey, S. (2026). Rethinking Environment, Social And Governance (ESG) In Critical Minerals Extraction In The Democratic Republic Of Congo. *The Extractive Industries And Society*, 27, 101938.
- Archer-Brown, E., & Rosenow, J. (2026). Throwing The Baby Out With The Bathwater: The End Of 32 Years Of UK Energy Efficiency Obligations. *Energy Policy*, 215, 115338.
- Arevalillo, J. M., Ramírez, J. M., Díaz-Aranda, S., Aguilar, J., Anta, A. F., & Lillo, R. E. (2026). Network Scale-Up Methods On Aggregated Relational Data To Estimate The Outcome Of Elections. *Social Networks*, 86, 312–324.
- Ayu, N. C. S., Syamsuddin, R. S., & Aziz, R. (2023). Pemberdayaan Berbasis Remaja Masjid Al-Mujahidin Desa Ciater. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(4). Doi: 10.15575/Tamkin.V6i4.24290
- Azis, A., Fitriana, M., & Husni. (2024). Penanaman Bibit Pohon Ketapang (*Terminalia Catappa*) Sebagai Upaya Mencegah Bahaya Erosi, Menjaga Ketersediaan Air Tanah Dan Sumber Pakan Hijauan Ternak Kambing Di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 306–317.
- Baumann, H., Hunziker, M., & Grêt-Regamey, A. (2026). Rethinking People-Place Bonds: Insights From A Multi-City Study On Place Attachment And Place Making For Inclusive Urban Planning. *Cities*, 175, 107144.
- Bieleman, M., Pot, F., & Tillema, T. (2026). High-Speed Rail As A Tool For Regional Development? Motivations, Decision-Making And Spatial Effects In Europe. *European Transport Studies*, 3, 100050.
- Brons, M. (2026). Basins, Barriers And Human-Marine (Im)Mobile Encounters: The

- Mundane Realities Of Post-Industrial Waterfront Regeneration In London's Royal Docks. *Geoforum*, 174, 104691.
- Burdelski, M. (2026). Conversation Analysis For Language Socialization. *Research Methods In Applied Linguistics*, 5(2), 100317.
- Daulay, M. T. (2020). Model Pengendalian Kemiskinan dengan Pendekatan Diversifikasi Usaha, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Economic Value (Studi pada Daerah Pemekaran di Sumatera Utara). *Quantitative Economics Journal*, 6(3).
- Deocarís, C. C., Decena, R. J. S., & Honrade-Sarabia, A. (2026). The Extractive Insecurity Paradox: A Human Security Diagnosis Of The Philippine Mining Sector. *The Extractive Industries And Society*, 27, 101891.
- Deviana, D., Husaini, H., & Abdullah, A. (2021). Analisis Alokasi Belanja Modal Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Pemerintah Kabupaten Seluma. *Jurnal Fairness*, 8(3), 183–198.
- Dhandhania, K., Mittal, S., & Pathak, M. (2026). Achieving Net Zero Emissions in India's Power Sector: The Dilemma Between Climate Justice And Energy Justice. *Energy And Climate Change*, 7, 100247.
- Dharma, F. A., Hariyanto, D., & Muharram, F. (2023). Construction of Political Identity on Instagram: Unveiling The Kadrun Hashtag Movement in Indonesia's 2024 Presidential Election: *Academia Open*, 8(2).
- Dong, Y., Reffat, R. M., & Liang, R. (2026). Integrating Digital Twins, BIM, And GIS For Urban Health Equity: Advancing Smart And Sustainable Healthcare Planning. *Sustainable Cities And Society*, 144, 107429.
- Dua, R. (2026). China's Vehicle Trade-In Subsidy: Impact, Cost-Effectiveness, And Barriers To Electric Vehicle Purchase. *Energy For Sustainable Development*, 93, 102021.
- Dwiyanto, A. (2016). *Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan*. 2, 40–51.
- EB, G. A., Pungkasanti, P. T., & Handayani, T. (2024). Strategi Smart Branding Dalam Pembangunan Smart City di Kabupaten Demak. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 320–335.
- Efendi, I., & Syafril, R. (2025). Implementasi Aplikasi Polri Super App Presisi Untuk Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Solok Selatan. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*, 9(1), 30–34.
- Elfiani, M., & Marpaung, G. N. (2025). Analisis Sektor Unggulan Sebagai Strategi Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 729–751.
- Falconí, F., Burbano, R., & Cango, P. (2026). Impactos De La Globalización Del Capital En El Desarrollo Desigual De América Latina Y El Caribe. *Expresión Económica. Revista De Análisis*, (55), 13–35.
- Fatchuriza, M., & Prasojo, T. A. (2021). Sistem Penanganan Pengaduan Berbasis E-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 45–53.
- Ferdinandus, S. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur Pedesaan di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon. *Equilibrium: Journal of Economics and Development Studies*, 1(2), 88–97.
- Habibi-Moshfegh, P., Naderpajouh, N., Morshedi, M., Fallah-Fini, S., & Wong, W.-W. (2026). Social Outcomes Of The Housing Market Under Climate Change. *Cities*, 174, 107050.
- Hafez, F. (2026). Ecological Ascetics And The Austere Spaces Of The Environment: Culture, Heritage And Traditions. *Cogent Arts & Humanities*, 13(1), 2651505.
- Hanny, H., Agustina, L., Lingga, I. S., Rapina, R., Carolina, Y., Marpaung, E. I., ... Goiyardi, E. (2020). Analisis Pemetaan Profil Badan Usaha Milik Desa Serta Potensi dan

- Permasalahannya di Bidang Pengelolaan Air Bersih: (Studi Kasus di Bumdes Kertajaya, Cianjur, Provinsi Jawa Barat). *PATRIA*, 2(1), 8–24.
- Hidayaturrahman, M. (2020). Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep. *Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 128–141.
- Huang, P. (2026). Micro–Macro Analysis of Network Change. *Social Networks*, 86, 446–457.
- Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh. *Tataloka*, 21(1), 75–84.
- Judijanto, L. (2026). The Biodiesel Paradox: Analyzing The Multi-Dimensional Challenges Of Indonesia’s B50 Mandate Implementation. *Engineering And Technology Journal*, 11(02), 9019–9033.
- Karacsonyi, D., Taylor, A., & Zander, K. K. (2026). At the Edge of (Un) Inhabitability? Spatial Diversity of Demographic Vulnerability To Increasing Heat Exposure Across Remote Towns of Northern Australia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 141, 106181.
- Koltunov, M., Tricarico, L., & Bisello, A. (2026). Financing Energy Communities: Actors, Instruments, Builders, And ESG Ecosystem Expectations In Italy. *Energy Policy*, 215, 115246.
- Lestari, A., Fuadi, F., & Rakhman Setyanto, A. (2026). Implementation Of Social Capital Contribution Of Rice Farmers In Meeting Household Needs (Case Study Of Sungkai Selatan District, North Lampung Regency) From An Islamic Economic Perspective. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(2), 268.
- Li, Q. (2026). When Do Mining Companies Broadly Redistribute Resource Rents? Evidence From China. *The Extractive Industries And Society*, 27, 101886.
- Lub, E., Wade, R., Van Summeren, L., & Devenish, A. (2026). Energy Sharing Within Dutch Energy Communities: An Institutional Analysis Using Ostrom’s Design Principles. *Utilities Policy*, 101, 102206.
- Maconachie, R., Radley, B., Barlow, A., & Sun, Y. (2026). Mining Governance And Green Energy Transitions: Developmental Implications for the Global South. *The Extractive Industries And Society*, 27, 101936.
- Madera, A., Thompson, R., Davies, I., Brooks, K., Roberts, T., Lang, W., & Turner, K. M. E. (2026). How To Evaluate England’s Weather-Health Alerting System: Scoping Results And Recommendations. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 141, 106176.
- Magnetti, J. (2026). Participation And Democratic Legitimacy Under A Carbon Tax: A Comparative Analysis Of Ireland And South Africa. *Energy and Climate Change*, 7, 100248.
- Maladi, R. F., Firdausy, A. G., & Madalina, M. (2024). Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Desa. *Bacarita Law Journal*, 4(2), 140–148.
- Mariani, L., Longo, A., & Brandoni, C. (2026). Households’ Intentions To Adopt Low-Carbon Technologies: The Role of Discounting and Anticipated Regret. *Energy Policy*, 214, 115282.
- Mehta, L., Kennedy-Walker, R., Vohra, A., Bhatkal, T., Harshe, P., Jadhav, V., & Kulkarni, S. (2026). Urban Community-Led Total Sanitation: Opportunities, Barriers and Lessons From Nanded, India. *World Development*, 205, 107336.
- Menezes, J. F., Nayak, S. G., & Yesodharan, R. (2026). Patterns Of Internet Use, Risky Online Behaviors, And Protective Practices Among Indian Adolescents: Evidence From A School-Based Study. *Children And Youth Services Review*, 186, 109018.
- Mikołajczyk, A., Majda, A., Podlewska, A., & Wróbel, A. (2026). Cultural Intelligence,

- Multicultural Personality Of Polish Students In Medical, Health, And Social Sciences. *Critical Public Health*, 36(1), 2660457.
- Muñoz, E., & Jaque, G. (2026). Sibling Correlations In Schooling Around The World: A New Database. *World Development*, 204, 107415.
- Obi, J. N., Ojo, E., & Eboh, E. C. (2026). Systematic Review Of Justice-Based Transitions In Climate, Renewable Energy, And Food Security From 2009 To 2025. *Green Technologies And Sustainability*, 4(3), 100402.
- Okberi, E., Khotami, K., & Herman, H. (2022). Efektivitas Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gemilang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 8(1), 10–19.
- Pambudi, A. S., Hidayati, S., & Pramujjo, B. (2022). Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Studi Kasus Perencanaan Dan Pelaksanaan di Provinsi Papua Barat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 188–210.
- Puustinen, T., Easthope, H., & Lösckhe, S. (2026). Power Dynamics Between Local Governments And Multi-Owned Properties In Redevelopment for Densification. *Cities*, 174, 107095.
- Rose, R. A., Washington, T., Stewart, C. J., & Malley, K. M. D. (2026). The Risk of School Dropout Among Youth In Formal And Informal Kinship Foster Care. *Children And Youth Services Review*, 186, 109029.
- Rosojati, H., Darmastuti, S., & Atiandina, D. (2023). Menatap Sustainable Development Pada Kereta Cepat. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(1), 19–29.
- Rostovskaya, T. K., Ananchenkova, P. I., & Rostovsky, R. V. (2026). On Implementation of The National Project “Demography” in the Part of Support of Families With Children. *Problemy Sotsial’noi Gigieny, Zdravookhraneniia I Istorii Meditsiny*, 34(2), 176–179.
- Schumpeter, J. A. (1912). Theorie Der Wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: Dunker And Humblot, In Translated By Opie, R.”. *The Theory Of Economic Development*, 1–234.
- Shabri, H., Edgina, I. M., & Said, M. (2022). Sistem Nilai Dalam Pembangunan Ekonomi Adil Dan Berkelanjutan: Analisis Aksiologi Islam. *Tamwil*, 8(1).
- Shiozaki, Y., Ohtsuka, R., Hikichi, H., Kondo, K., Kawachi, I., & Aida, J. (2026). Can Pre-Disaster Community Resilience Enhance Post-Disaster Recovery Among Older Adults? A Natural Experiment In Iwanuma City After The 2011 Great East Japan Earthquake And Tsunami. *International Journal Of Disaster Risk Reduction*, 141, 106184.
- Sholikhah, I. M., & Khoiriawati, N. (2022). Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis Value For Money. *BUDGETING: Journal of Business, Management And Accounting*, 4(1), 38–54.
- Srinitiworawong, P., & Kiattisin, S. (2026). Explaining Public Acceptance of Small Modular Reactors in Thailand: Planned Behavior, Innovation Attributes, Moral Norms, Risk–Benefit, and Knowledge Sharing. *Energy For Sustainable Development*, 93, 101985.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798–1811.
- Sumarni, M., Bahtiar, B., Abdain, A., & Takdir, T. (2024). Eksistensi Kantor Pertanahan Kota Palopo Dalam Mengatasi Konflik Kepemilikan Tanah. *Al-Mizan (E-Journal)*, 20(2), 423–440.
- Thiri, M. A., & Martinez-Alier, J. (2026). Extractivism Unleashed: Environmental Justice And Resistance In Myanmar. *The Extractive Industries And Society*, 27, 101927.

- Valentin, P., Isabella, I., & Amaliatulwalidain, A. (2024). Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 86–92.
- Van Cranenburgh, S., & Garrido-Valenzuela, F. (2026). A Utility-Based Spatial Analysis Of Residential Street-Level Conditions A Case Study Of Rotterdam. *Cities*, 174, 107066.
- Veilleux, M., Bourmaud, A., Ghosn, J., Foussier, A., Thoison, C., Huas, C., ... Martin, P. (2026). Sexual Health Interventions For Young People With Mental Disorders: A Scoping Review. *Children And Youth Services Review*, 186, 108988.
- Velayo, A. R. A., Suson, P. D., Aguilos, M. M., Zhao, P., & Bacosa, H. P. (2026). Nature-Based Solutions: Assessing Urban Greenspace Availability In Iligan City, Philippines. *Geography, Environment, Sustainability*, 18(4), 103–114.
- WINEY, A. R., & SIREGAR, S. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan. *Jiep: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2(4), 915–924.
- Yuliana, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 100–111.
- Zhang, L., Lan, F., Guo, M., & Zhao, X. (2026). Exploring Socio-Spatial Mechanisms Underlying Urban Activity Patterns: A Data-Driven Study of Chinese Megacities. *Cities*, 174, 107076.